



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SUB UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUN SUWARNO
2. Jabatan : KOORDINATOR PENGAWASAN BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN SERTA
PEMBINAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
3. NHK : 64045

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 360.500.000
1. Tanah Seluas 580 m2 di BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
 2. Tanah Seluas 855 m2 di BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
 3. Tanah Seluas 255 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 75.500.000
 4. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/70 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
 5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/450 m2 di BLORA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 37.000.000
1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
 2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
 3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
 4. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 3.500.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. ----
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 43.300.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	444.300.000
III. HUTANG	Rp.	190.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	254.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Desember 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.